



Pemda DIY dan BPK Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, didampingi Sekda DIY, Beny Suharsono menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik beserta jajarannya di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Senin (6/1).

Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dengan BPK RI Perwakilan DIY.

Dalam audiensi yang berlangsung,

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Beny juga menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dan BPK dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Gubernur DIY dan jajarannya.

Agustin yang baru saja menjabat se-

Gubernur DIY mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan silaturahmi tersebut. Menurut Sri Sultan, koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah DIY dan BPK selama ini telah terbukti memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan yang sudah terjalin baik selama ini," ujar Sri Sultan.

Sekda DIY, Beny Suharsono mengung-

bagai Kepala Perwakilan BPK DIY pada Agustus 2024 ini berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di wilayah Yogyakarta.

Agustin Sugihartatik memiliki pengalaman panjang di BPK, di mana sebelum menjabat di BPK DIY, ia pernah memimpin Sub Auditorial di BPK Perwakilan DIY pada 2019 dan mutasi ke BPK Pusat pada 2021 sebelum akhirnya kembali ke Yogyakarta. **(han)**

kapkan dua topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah DIY, di mana Pemerintah Daerah meminta BPK untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas program dan anggaran yang telah dialokasikan.

"Kami meminta BPK untuk mengevaluasi apakah program yang ada dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan kesesuaian antara kebutuhan dengan realisasi anggaran," jelas Beny.